

ABSTRAK

Penelitian ini membahas alasan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konflik Ethiopia-Tigray pasca penandatanganan *Pretoria Agreement* tahun 2022. Meskipun perjanjian ini bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dan menjamin perlindungan HAM, pelanggaran terus terjadi terutama oleh pasukan Ethiopia dan Eritrea. Penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme dengan pendekatan *Norm Life Cycle (emergence, cascade, internalization)* untuk menganalisis bagaimana norma perlindungan HAM dalam *Pretoria Agreement* disebarluaskan dan diinternalisasi oleh para aktor utama, termasuk Pemerintah Ethiopia, TPLF, dan Eritrea. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksplanatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan terjadinya pelanggaran HAM dalam konflik Ethiopia-Tigray disebabkan oleh tiga faktor utama: ketidakpatuhan para pihak terhadap isi perjanjian, lemahnya mekanisme implementasi dan pemantauan, serta intervensi Eritrea yang menolak norma perlindungan HAM. *Pretoria Agreement* belum sepenuhnya mencapai tahap internalisasi karena masih lemahnya penerimaan norma oleh para aktor terlibat. Penelitian ini menunjukkan pentingnya proses normatif dalam menjamin efektivitas perjanjian damai pasca konflik.

Kata kunci: Ethiopia, Tigray, pelanggaran HAM, *Pretoria Agreement*, *Norm Life Cycle*

ABSTRACT

This research discusses the reasons for human rights violations (HAM) during the Ethiopia-Tigray conflict following the signing of the Pretoria Agreement in 2022. Although this agreement aims to end violence and ensure the protection of human rights, violations continue to occur, especially by Ethiopian and Eritrean forces. This study uses constructivist theory with a Norm Life Cycle approach (emergence, cascade, internalization) to analyze how the norms of human rights protection in the Pretoria Agreement are disseminated and internalized by key actors, including the Ethiopian Government, TPLF, and Eritrea. The research method used is explanatory qualitative. This research shows that the reasons for human rights violations in the Ethiopia-Tigray conflict are caused by three main factors: the non-compliance of the parties with the contents of the agreement, the weak implementation and monitoring mechanisms, and the Eritrean intervention that rejects the norms of human rights protection. The Pretoria Agreement has not fully reached the stage of internalization due to the weak acceptance of the norms by the involved actors. This research shows the importance of the normative process in ensuring the effectiveness of post-conflict peace agreements.

Keywords: *Ethiopia, Tigray, human rights violations, Pretoria Agreement, Norm Life Cycle*